

# Pelatihan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Milik Nagari Sako Selatan Badunsanak di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan

Randy Heriyanto <sup>a,1</sup>, Fitra Oliyan <sup>a,2\*</sup>, Rini Frima <sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis, Padang, Indonesia

<sup>1</sup> randy@pnp.ac.id\*; <sup>2</sup> fitraoliyan@pnp.ac.id; <sup>3</sup> rinifrima1984@gmail.com

\* Penulis koresponding

## INFO ARTIKEL

Tanggal terima : 01-11-2021

Tanggal revisi : 03-11-2021

Tanggal terbit : 22-02-2022

### Kata Kunci

Pengabdian Kepada Masyarakat

BUMNAG

Laporan Keuangan

Sumber Daya Manusia

DOI:

## ABSTRAK

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sako Selatan Badunsanak. Pengelolaan keuangan meliputi kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan yang tertuang dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Laporan keuangan BUMNAG memperlihatkan kinerja dan digunakan untuk pengambilan keputusan untuk keberlanjutan usaha. Selain itu laporan keuangan juga dapat digunakan oleh para stakeholder selaku investor seperti pemerintah dan masyarakat untuk keputusan investasi. BUMNAG Sako Selatan Badunsanak telah melaksanakan kegiatan usaha dibawah pengawasan Wali Nagari sejak tahun 2016. Namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) akan pemahaman dan keterampilan pengelolaan dan pelaporan keuangan membuat BUMNAG terkendala dalam pembukuan dan pelaporan keuangan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode memberikan pelatihan kepada Pengelola Operasional agar dapat menyelesaikan permasalahan teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dihadapi.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pengenalan

BUMDes atau BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa/Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa/Nagari yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatat Desa. Hal yang paling penting sebagai prinsip awal dari penguatan ekonomi nagari adalah kooperatif dan memperkuat kerjasama [1]. Membangun kebersamaan dan menjalin hubungan dengan semua lapisan nagari dapat menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Kekuatan kerjasama (kooperatif) ini dapat menjaga BUMNag agar terhindar dari sistem usaha kapitalis yang menyusup masuk kedalam nagari yang dapat merusak dan mengganggu nilai-nilai kehidupan bersama.

Secara umum, pengelolaan BUMNag harus dilaksanakan berdasarkan enam prinsip. Prinsip pengelolaan BUMDes atau BUMNag menurut Panduan Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa [2] yang diterbitkan oleh PKDSP Universitas Brawijaya Tahun 2007 meliputi: a) Prinsip

Kooperatif, merupakan prinsip kunci yang menjadi corak sosial nagari. Semua komponen yang terlibat harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup manusia; b) Prinsip Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMNag; c) Prinsip Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama; d) Prinsip Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; e) Prinsip Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; f) Prinsip Suistainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMNag.

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag [3] berdasarkan Peremendes PDIT No. 4 Tahun 2015 terdiri dari; a. Penasihat; b. Pelaksana Operasional; dan c. Pengawas. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan atau dalam hal ini Wali Nagari. Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMNag termasuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha setiap bulan. Sedangkan Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNag. Penting bagi Pelaksana Operasional BUMNag untuk memahami cara mengelola BUMNag dan memahami prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMNag secara baik. Karena ketika pengelola tidak paham akan prinsip tersebut, maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan atau bahkan benar-benar ada indikasi penyelewengan penggunaan pendanaan atau aktivitas yang tidak sesuai tujuan pendirian BUMNag.

Sejalan dengan tugas dari masing-masing pengurus organisasi, Pelaksana Operasional memiliki peran dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Selain itu, laporan keuangan juga memperlihatkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait kelanjutan kegiatan operasional perusahaan. [4] Laporan keuangan yang baik dapat dijadikan alat sebagai bahan komunikasi dan evaluasi untuk *going concern* BUMDes kedepan. Dalam laporan keuangan tercermin struktur modal dan laba atau rugi BUMDes.

Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, maka laporan keuangan BUMDes meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, dan catatan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. BUMNag/BUMDes dalam menyusun laporan keuangan harus memperhatikan dengan jelas standar keuangan yang digunakan, artinya dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP). Dalam SAK ETAP (2013) pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini artinya bahwa BUMDes/BUMNag harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SAK ETAP. Tujuan dari penyusunan SAKETAP bukan hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang belum *go public* termasuk BUMDes. Pembuatan laporan keuangan harus bersifat jujur dan transparan. BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun [4].

Sesuai dengan peraturan diatas, BUMNag Sako Selatan Badunsakan sudah seharusnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan prinsip. Hasil penelitian Kunarsih (2017) dalam penelitian Baretha [5] menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum dapat dicapai secara optimal. Tingkat pencapaian hasil kerja BUMDes dalam pandangan masyarakat sebagian besar masih menyatakan rendah; Rendahnya kinerja BUMDes disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal desa dalam pengelolaan BUMDes, manfaat yang belum dirasakan oleh masyarakat serta lemahnya peran masyarakat dalam pengelolaan BUMDes; Masih lemahnya kinerja pengelolaan BUMDes juga ditengarai oleh dominasi peran perangkat desa dalam

pengelolaan BUMDes. Dominasi tersebut disebabkan oleh adanya *role ambiguity* dan *role conflict* dalam organisasi sehingga prinsip privatisasi dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal. Akibatnya pengelolaan BUMDes belum bisa dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab.

Hal serupa juga dialami oleh BUMNag Sako Selatan Badunsak. Keterbatasan SDM pengelola BUMNag serta terbatasnya kemampuan administrasi usaha dalam hal ini pelaporan keuangan merupakan permasalahan yang menjadi prioritas mitra saat ini. Berikut ini adalah pengeritan SDM [6] SDM adalah 1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenagakerja, pekerja, atau karyawan); 2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya; 3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material atau non financial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Dari pengertian SDM tersebut dapat dilihat, peran SDM BUMNag Sako Selatan merupakan komponen penggerak dalam kegiatan operasional. Sejak awal berdirinya BUMNag Sako Selatan Badunsank belum ada pengelolaan keuangan yang benar-benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pencatatan keuangan masih sebatas uang masuk dan uang keluar untuk setiap lini bisnis. Pencatatan keuanganpun juga masih dibantu oleh Perangkat Nagari. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan diperlukan suatu pelatihan terkait pengelolaan keuangan mitra yang bisa memenuhi kebutuhan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BUMNag sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

## 2. Masyarakat Target kegiatan

Kelompok masyarakat yang menjadi tempat dilakukannya bimbingan teknis ini adalah BUMNag Sako Selatan Badunsanak. BUMNag Sako Selatan Badunsanak adalah sebuah Badan Usaha Milik Nagari yang berada dibawah pengawasan Wali Nagari Sako Selatan Pasir Talang yang berlokasi di Nagari Sako Selatan Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. BUMNag ini didirikan pada tahun 2016 dengan kepengurusan inti berjumlah 3 orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pada tahun 2017 BUMnag ini memperoleh penyertaan modal sebesar Rp 50.000.000 untuk usaha budidaya ikan (kolam ikan). Tahun 2019 memperoleh penyertaan modal sebesar Rp 100.000.000 untuk usaha sewa pelaminan. Penyertaan modal tersebut berasal dari APB Nagari. Kemudian ditahun 2019 juga memperoleh hibah satu unit bus dari Kementerian Perhubungan yang digunakan untuk usaha sewa bus. BUMNag Sako Selatan Badunsanak saat ini memiliki tiga lini bisnis yaitu budidaya ikan, sewa pelaminan, dan sewa bus. Ketiga lini bisnis atau unit usaha ini dikelola langsung oleh BUMNag dibawah pengawasan Wali Nagari. Lini bisnis yang dikelola ini tergolong banyak dibandingkan Badan Usaha Milik Nagari Lainnya yang berada di Kab. Solok Selatan. Namun demikian, dalam pengelolaan kuangnya masih belum terbukukan secara standar.

## 3. Metode Kegiatan Pengabdian

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan mitra adalah melalui metode diskusi, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan bimbingan teknis dalam menyusun laporan keuangan, setelah itu dilakukan pendampingan kepada mitra dalam menerapkan materi pelatihan. Metode kegiatan pengabdian secara umum meliputi metode diskusi, bimbingan teknis, dan pendampingan.

### 3.1. Diskusi

Metode diskusi ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh mitra dalam proses pembukuan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan operasional. Proses diskusi diawali dengan diskusi singkat dengan Wali Nagari Sako Selatan mengenai kondisi unit usaha BUMNag dan juga usaha yang dijalankan oleh anak nagari yang dinamakan Lapau Nagari, kemudian dilanjutkan dengan pengelola BUMNag Sako Selatan Badunsanak. Hasil dari diskusi ini digunakan untuk merumuskan metode dan materi pelatihan serta pendampingan yang cocok dan tepat untuk mengatasi permasalahan mitra.

### **3.2. Bimbingan Teknis**

Metode ini dilakukan dengan memberikan materi pelatihan secara offline atau langsung dilapangan kepada peserta pelatihan yang meliputi penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Materi pelatihan terdiri dari:

- a. Pengelolaan BUMNag yang sesuai dengan ciri khas Nagari.
- b. Penyusunan Laporan menggunakan *software* Microsoft Excel.

### **3.3. Pendampingan**

Metode pendampingan dilakukan dalam rangka memastikan mitra mampu menerapkan pelatihan yang diberikan. Pendampingan diberikan kepada bagian yang terlibat langsung dalam menyusun laporan keuangan, yaitu bagian pelaksana operasional dalam hal ini bendahara BUMNag.

### **3.4. Metode Pengukuran Ketercapaian Tujuan Kegiatan**

Pengukuran ketercapaian tujuan kegiatan dilakukan dengan cara melakukan uji coba langsung pencatatan keuangan pada aplikasi laporan keuangan yang telah diberikan. Uji coba ini dilakukan oleh Bendahara BUMNag dalam mencatat beberapa transaksi keuangan yang sering terjadi. Pengukuran dilihat dengan apakah pencatatan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi, dimulai dari akun yang digunakan apakah sudah benar, kemudian apakah perhitungannya telah sesuai, dan apakah laporan keuangan yang dihasilkan sudah benar.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

Berikut ini adalah hasil dari kegiatan pengabdian dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh TIM PKM di BUMNag Sako Selatan Badunsanak.

### **4.1. Kegiatan Diskusi**

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk silaturahmi dan kunjungan oleh tim PKM ke BUMNag Sako Selatan Badunsanak. Kegiatan PKM ini diawali dengan diskusi bersama penasihat dalam hal ini adalah Wali Nagari Sako Selatan, dan pelaksana operasional yaitu Ketua dan Bendahara BUMNag mengenai permasalahan dan kendala manajemen dalam mengelola usaha. Berdasarkan hasil diskusi tersebut diperoleh beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan BUMNag, yaitu sejak awal berdirinya BUMNag tahun 2017 belum ada pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan; Pencatatan keuangan masih sebatas uang masuk dan uang keluar; Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengelola tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi; serta belum ada bimbingan teknis dari pihak terkait untuk menyusun laporan keuangan. Hasil dari diskusi ini digunakan untuk merumuskan metode dan materi pelatihan serta pendampingan yang cocok dan tepat kepada mitra dalam kegiatan PKM.

### **4.2. Bimbingan Teknis**

Kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2021, yang diadakan di aula Kantor Wali Nagari yang dibuka langsung oleh Wali Nagari Sako Selatan Pasir Talang Bapak Pepi Suhendra, didampingi oleh Ketua BUMNag Sako Selatan Badunsanak Bapak Okta Doni Yandra. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pengurus BUMNag, Ketua LPMN, Perangkat Nagari, dan Pengurus Lapau Nagari. BUMNag Sako Selatan Badunsanak saat ini memiliki beberapa unit usaha yaitu sewa pelaminan, sewa bus dan pembuatan sandal hotel dan sandal wudhu. Keempat unit usaha ini dikelola langsung oleh BUMNag dibawah pengawasan Wali Nagari. Unit-unit usaha yang dikelola ini tergolong banyak dibandingkan Badan Usaha Milik Nagari Lainnya yang berada di Kab. Solok Selatan. Namun demikian, dalam pengelolaan kuangannya mitra masih melakukan pembukuan secara manual dalam hal pencatatan kas masuk dan keluar saja, ungkap Ibu Edri Yanti selaku Bendahara BUMNag.

Kegiatan PKM dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah acara pembukaan, dan sesi kedua adalah pelaksanaan bimtek dan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan BUMNag. Sesi pelaksanaan bimtek adalah memberikan penjelasan tentang materi pelatihan yang oleh tim. Materi pelatihan pertama adalah mengenai Pengelolaan BUMNag yang sesuai dengan ciri khas Nagari, dan materi kedua adalah tentang Penyusunan Laporan menggunakan *software* Microsoft Excel.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan

#### 4.3. Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada bagian yang terlibat langsung dalam menyusun laporan keuangan, yaitu bagian pelaksana operasional dalam hal ini bendahara BUMNag yang juga diikuti oleh pengurus lainnya. Pendampingan dilaksanakan setelah penjelasan materi oleh tim diberikan. Proses pendampingan ini bertujuan untuk memastikan mitra bisa menyusun laporan keuangan dengan menggunakan *software* Microsoft Excel.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan

#### 4.4. Ketercapaian Tujuan Kegiatan.

BUMNag Sako Selatan Badunsanak sebelumnya masih melakukan pembukuan secara manual dan hanya sebatas kas masuk dan kas keluar saja. Pembukuan tersebut masih belum menggambarkan posisi keuangan BUMNag secara keseluruhan dan belum sesuai dengan standar akuntansi. Dengan diberikannya template laporan keuangan oleh Tim PKM, pelaporan keuangan BUMNag sekarang sudah bisa dibukukan secara terstruktur dan menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan BUMNag secara keseluruhan. Selama tahap Uji Coba, Tim PKM dapat melihat Pengelola BUMNag dapat melakukan pembukuan yang mengarah pada konsep dasar akuntansi sesuai dengan pengarahannya yang telah diberikan oleh Tim PKM. Hasil ini sejalan dengan penelitian Baretha [5], dimana setelah dilakukannya kegiatan PKM, Mitra terbantu dalam proses penyusunan laporan keuangan yang rapi dan sesuai dengan standar akuntansi.

#### 5. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan PKM berupa Pelatihan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Milik Nagari pada BUMNAG Sako Selatan Badunsanak. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu pihak pengelola

BUMNag dalam proses penyusunan laporan keuangan yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik BUMNag. Metode diskusi, pelatihan, dan pendampingan merupakan cara pendekatan yang dipilih dalam kegiatan PKM. Materi pelatihan meliputi Pengelolaan BUMNag yang sesuai dengan ciri khas Nagari, dan materi Penyusunan Laporan menggunakan *software* Microsoft Excel.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelola BUMNag dalam menyusun laporan keuangan unit usaha. Penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan aplikasi *spreadsheet* yang sudah dibuatkan oleh tim format Laporan Keuangannya. Semoga dengan adanya kegiatan ini pembukuan dan pelaporan keuangan BUMNag menuju lebih baik lagi dan usaha-usaha yang sedang berjalan saat ini bisa lebih berkembang dan berdaya saing, sehingga dapat memperkuat perekonomian nagari yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi nagari setempat.

### Rujukan

- [1] EkaSiskawati, Armel Yentifa, dan Fitra Oliyan, “Bimbingan Teknik Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Menggunakan Laporan Aurs Kas Pada Badan Usaha Milik Nagari”, Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat PNP, Vol. 1, No.1, Desember 2019, pp. 31-36.
- [2] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijayarences)
- [3] Permendes PDTT RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Des.
- [4] Zahrah Indah Ferina, dkk, “Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi BUMDes’ Desa Pulau Panggungkecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah’, Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia, Vol. 3, No. 1, 2020.
- [5] Baretha M Titioka, dkk, “Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Kabupaten Kepulauan Aru”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak, Vol. 03, No. 01, Juni 2020.
- [6] Komang Eni Candraningsih, dkk. “Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia Pada BUMDes Bulian Kecamatan Kubutambahan”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 8 No. 1, April 2018.